

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Setelah lebih dari 25 tahun tatanan globalisasi diperkenalkan barat, tidak dipungkir dan terbukti lebih menguntungkan negara-negara barat dan sekaligus membuat kondisi ekonomi, politik dan sosial di negara-negara berkembang menjadi lebih rentan dan tidak stabil. Perusahaan-perusahaan multinasional kini menjadi perusahaan raksasa kelas dunia yang menguasai sumber daya dan kekayaan alam negara berkembang dan mengatur pola transaksi perdagangan atau pasar dunia agar menguntungkan dan menciptakan ketergantungan kepada mereka.

Globalisasi telah berhasil membangun imperium hegemonitas kekuasaan dunia ditangan segelinitir orang. Sekaligus globalisasi juga telah memberikan kontribusi meningkatkan kemiskinan di negara-negara berkembang. Data yang dikeluarkan oleh Bank Dunia menunjukkan 49% atau separuh penduduk Indonesia tetap berada dibawah garis kemiskinan sementara kekayaan alam (tambang dan hutan) sekarang semakin menipis. Stiglitz sebagai pemenang Nobel Ekonomi 2001 dan dianggap sebagai juru bicara negara-negara berkembang, menyatakan bahwa “globalisasi tidak otomatis menguntungkan orang miskin dan jika anda obyektif melihat, situasi dunia saat ini tidak adil untuk negara berkembang”.

Lima belas tahun setelah Stiglitz, keberpihakan terhadap “Si Miskin” dilanjutkan oleh Deaton (Kompas, 2015) yang mendapatkan Nobel Ekonomi 2015 melalui banyak penelitiannya mengenai Konsumsi, Kemiskinan dan Kesejahteraan. Salah satu inti pesannya adalah “Jangan biarkan kaum kaya mempengaruhi kebijakan publik demi kepentingan warga kaya itu sendiri. Pemerintah dengan sistem politik yang baik bukan sistem politik yang mendistorsi, harusnya mampu mensejahterahkan rakyat”.

Tahun 1974 pemenang nobel dan pakar ekonomi Paul Samuelson juga telah memberikan “*early warning*” serupa dengan menyatakan “Jangan terbius dengan data makro seperti pertumbuhan ekonomi sebab tidak otomatis pertumbuhan tersebut memakmurkan semua rakyat, lihatlah kelompok mana yang paling diuntungkan dengan pertumbuhan tersebut.”

Kesungguhan dan keberpihakan elite politik dan pemerintah dalam upaya memberantas kemiskinan dan atau mensejahterahkan rakyat miskin masih belum jelas terlihat dalam kebijakan yang ada saat ini. Problematika kemiskinan dan kesejahteraan belum dapat diatasi, namun timbul ancaman kembali berupa tatanan ekonomi baru dengan nama MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). Pemberlakuan MEA berpotensi adanya negara kecil namun memiliki kekuatan ekonomi besar akan mendominasi kebijakan-kebijakan ekonomi di tanah air. Sehingga dikuatirkan Indonesia akan menjadi negara yang mudah di “atur” oleh negara ASEAN lainnya dan hanya dipandang sebagai negara dengan pasar yang besar, bukan sebagai negara

yang menarik untuk berinvestasi yang berkorelasi terhadap pembukaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan regionalnya.

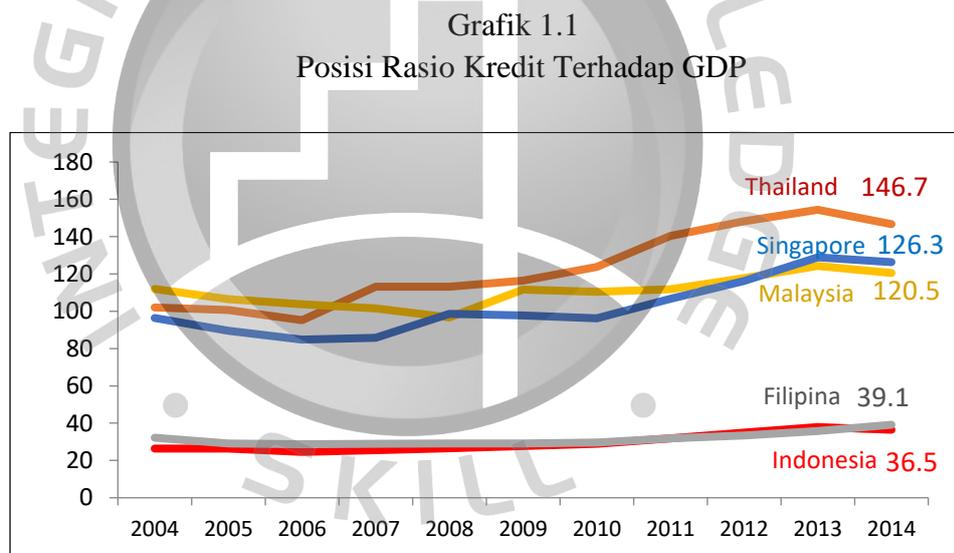
Untuk membangun dan menciptakan kemandirian sektor finansial regional dan lokal melalui sistem perbankan yang ada saat ini, khususnya dalam menghadapi pasar bebas keuangan MEA tahun 2020 masih banyak kendala yang harus dihadapi antara lain :

- a. Keterbatasan kapasitas dan kompetensi bank regional (Bank Daerah) untuk lebih berani mengeksplorasi potensi ekonomi dan keuangan di wilayahnya, agar tidak hanya fokus pada *captive market* segmen pembiayaan konsumsi.
- b. Meningkatkan kapasitas usaha bank-bank regional melalui pemisahan (*spin off*) Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi Bank Umum Syariah (BUS) masih menghadapi kendala, terutama para birokrasi daerah belum mampu melihat visi dan misi yang lebih besar dengan adanya *spin off* tersebut.
- c. Stimulus yang diberikan oleh otoritas untuk aspek permodalan bank *spin off*, yaitu pada tahap awal sebesar Rp 500 milyar dibandingkan pendirian modal awal bank umum konvensional sebesar Rp 2 Trilyun, masih menjadi kendala dalam proses pemenuhannya.
- d. Birokrasi pada pemerintah daerah belum seluruhnya menyadari bahwa potensi ekonomi dan keuangannya terancam oleh negara-negara MEA, antara lain karena lemahnya koordinasi dan sinergi

antar instansi dan sektor serta keterlibatan pemerintah daerah dalam menghadapi MEA.

Masih rendahnya kesadaran terhadap kesiapan pasar bebas keuangan MEA tahun 2020 dan upaya pembenahan yang masih berjalan lambat, akan berdampak terhadap rendahnya akses kepada lembaga keuangan (inklusifitas), serta sektor keuangan nasional yang memiliki potensi besar masih belum dapat dikelola secara optimal.

Jika dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN lainnya, tingkat inklusifitas perbankan Indonesia tergolong rendah, sebagaimana Grafik 1.1 mengenai rasio kredit terhadap GDP negara-negara ASEAN sebagai berikut:



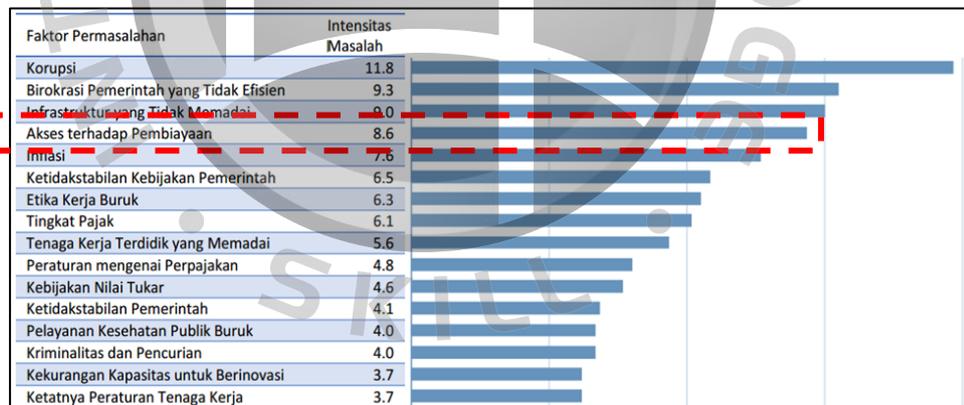
Sumber : ASEAN Secretariat, 2016

Untuk negara Thailand, Singapura dan Malaysia sebagaimana grafik diatas rasionya telah melampaui 100%, hal ini mengindikasikan bahwa pasar keuangan negara tersebut khususnya untuk penyediaan dana (kredit) mengalami persaingan yang sangat ketat. Sementara Indonesia dengan posisi

rasionya sebesar 36,5% masih sangat rendah atau memiliki potensi penyerapan yang besar untuk penyediaan dananya. Dengan demikian Indonesia akan menjadi target pasar keuangan oleh bank-bank dari negara-negara tersebut, kelak pada saat diberlakukannya pasar bebas keuangan ASEAN tahun 2020 nanti.

Rendahnya inklusifitas perbankan nasional dalam penyaluran dana yang tercermin dari Rasio Kredit terhadap GDP tersebut, berdampak bagi pelaku usaha khususnya usaha mikro dan UKM. Hal ini tercermin sebagaimana grafik 1.2 mengenai faktor-faktor permasalahan yang dihadapi oleh UKM, dimana akses terhadap pembiayaan menjadi urutan ke 3 tertinggi dari faktor-faktor permasalahan UKM.

Grafik 1.2  
Faktor-Faktor Permasalahan UKM



Sumber : world economic forum, 2016

Indonesia sebagai negara mayoritas muslim selain memiliki potensi kekuatan ekonomi yang besar, juga memiliki sistem ekonomi komprehensif yang bertujuan membawa kesejahteraan dengan prinsip kemaslahatan dan

berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagian dari sistem ekonomi tersebut salah satunya adalah lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) atau yang dikenal sebagai BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*). Namun kekuatan ekonomi tersebut belum sepenuhnya disadari oleh umat Islam. Bahwa BMT mampu untuk mengangkat nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan bagi anggota masyarakat yang lemah dan miskin melalui distribusi kekayaan dari anggota masyarakat yang mampu atau surplus dan lahir atau diinisiasi oleh masyarakat itu sendiri. Sehingga BMT merupakan sistem ekonomi dan keuangan yang sekaligus dapat menyatukan kepentingan ekonomi dengan kepentingan sosial dalam masyarakat.

Landasan berdasarkan Al Quran pada Surat Al Anfal ayat 60, bahwa umat Islam diminta harus senantiasa mempersiapkan dengan segala kemampuannya agar tidak diperdayakan oleh lawan-lawannya dan Allah akan memberikan pertolongan bilamana tetap berada dalam syariat Allah.

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ  
تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَعَآخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ  
يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ  
لَا تُظْلَمُونَ ﴿٦٠﴾

*Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggetarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan). (Al Anfal : 60)*

Mengacu pada ayat tersebut, maka kita wajib mempersiapkan diri antara lain dengan menyusun dan memiliki berbagai macam kekuatan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan, agar para pesaing atau *competitor* menjadi tidak berdaya, tidak berpikir dan tidak berani untuk memperdaya atau menghancurkan kita. Serta apapun yang kita perbuat untuk di jalan Allah, maka Allah akan memberikan balasan bagi kita secara sempurna dan utuh.

Berdasarkan latar belakang dan kajian penelitian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk meneliti “*Strategi Mewujudkan Kemandirian Sektor Finansial Regional Melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT) yang Berkelanjutan (Sustainability), Dalam Rangka Menghadapi Era Pasar Bebas Keuangan MEA Tahun 2020*”.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Sejarah perjalanan dan perkembangan ekonomi, keuangan dan perbankan nasional yang semakin menuju kepada liberalisasi, hal ini antara lain tercermin oleh adanya berbagai regulasi perbankan yang menyebabkan struktur kepemilikan bank-bank yang semula adalah milik swasta nasional kini berubah menjadi mayoritas milik asing. Tanpa disadari perubahan struktur kepemilikan tersebut tidak diikuti dengan regulasi yang melindungi kepentingan di pelosok tanah air dari berbagai agenda kepentingan asing tersebut. Sehingga saat ini bank-bank dengan kepemilikan asing tersebut dengan leluasa dan tanpa hambatan yang berarti dapat menggarap segmen pasar manapun, pada wilayah dimanapun dan untuk nominal penyediaan dana maupun mobilisasi dana masyarakat berapun.

Sektor keuangan nasional sebenarnya sejak lama telah memiliki berbagai macam lembaga keuangan skala mikro, seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Badan Kredit Desa (BKD), Lembaga Perkreditan Desa, Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Baitul Maal Watamwil (BMT), BRI Unit Desa dan berbagai bentuk lembaga keuangan mikro lainnya, mereka beroperasi sesuai dengan karakteristik masing-masing dan menjadi salah satu penunjang sektor finansial di wilayahnya, serta utamanya memiliki keberpihakan terhadap pelaku usaha kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah di wilayahnya.

Dengan memperhatikan latar belakang masalah tersebut diatas, maka keberadaan lembaga keuangan mikro khususnya BMT ditengah-tengah masyarakat menjadi penting dan strategis, bukan saja mampu untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat namun juga diharapkan mampu membendung arus kuat lembaga keuangan milik asing yang mulai merambah masuk ke pelosok pedesaan dan perkotaan di tanah air.

Sehingga identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Lembaga keuangan mikro khususnya BMT dapat menjadi garda terdepan sektor finansial regional dan lokal, sehingga harus mampu mempersiapkan diri agar tidak tergilas dalam persaingan global maupun pada era MEA (pasar keuangan) tahun 2020.
- b. Lembaga keuangan mikro khususnya BMT dapat menjadi penggerak utama terwujudnya kemandirian sektor finansial di wilayahnya, dimana bank-bank dari negara-negara ASEAN nantinya akan

melakukan ekspansi usahanya secara lebih leluasa ditanah air (*low entry barriers*), sehingga perlu adanya praktek-praktek terbaik dalam pengelolaan operasional lembaga keuangan mikro khususnya BMT yang berkelanjutan (*sustainability*).

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan merujuk pada penelitian sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi sustainabilitas kelembagaan di BMT ?
- b. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi sustainabilitas keuangan di BMT ?
- c. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi aspek eksternal di BMT ?
- d. Bagaimana kerangka sustainabilitas berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan ?
- e. Bagaimana kerangka sustainabilitas dapat di implementasikan pada BMT ?

### **1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Tujuan penelitian**

Tujuan utama dari tesis ini adalah untuk mengetahui aspek-aspek yang berperan terhadap sustainabilitas (*sustainability*) BMT baik secara kelembagaan maupun secara finansial dan aspek-aspek tersebut seyogyanya dapat diaplikasikan. Sehingga akan lebih mudah untuk mengembangkan dan

memperkuat daya saing serta meningkatkan tingkat kepercayaan BMT sebagai lembaga keuangan mikro (*trust entity*).

Sesuai rumusan masalah dan kerangka penelitian diatas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang paling berpengaruh sustainabilitas BMT.
- b. Mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap sustainabilitas kelembagaan BMT yang mencakup organisasi, Sumber Daya Insani, tugas dan kewenangan, kebijakan dan prosedur, manajemen risiko pembiayaan, keterjangkauan aktivitas dan produk serta sistem pengendalian internal.
- c. Mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap sustainabilitas keuangan BMT yang mencakup faktor permodalan, kualitas aset, likuiditas, profitabilitas dan efisiensi.

#### **1.4.2. Manfaat penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut

- a. Sebagai masukan dalam penyusunan strategi bagi BMT dengan mengacu kepada faktor-faktor keberhasilan agar mencapai kesinambungan operasional (sustainabilitas).
- b. BMT yang sehat dan memiliki sustainabilitas akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BMT dan mendorong pendirian BMT-BMT baru pada masing-masing wilayah, sehingga akan

terwujud kemandirian sektor finansial pada masing-masing wilayahnya.

- c. Meletakkan dasar-dasar masyarakat madani di pedesaan yang dimulai dengan adanya kelembagaan BMT yang sehat dan memiliki sustainabilitas.
- d. Menjadikan BMT sebagai salah satu mata rantai yang dapat diandalkan dalam sistem finansial inklusif, sekaligus nantinya diharapkan sebagai garda terdepan dalam menghadapi persaingan sektor finansial di wilayahnya pada era KEA.

### **1.5. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini dibatasi hanya pada pembahasan terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan penguatan atau keberlanjutan operasional lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) atau BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) yang menjadi anggota Induk Koperasi Syariah (Inkopsyah). Responden yang dipilih adalah para praktisi dan seperti : Pengurus dan Manajer BMT, Pejabat bank yang memiliki keterkaitan dengan BMT.